

## **AMARTYA SEN DAN IDEALISME INDONESIA EMAS 2045 DAN DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA ERA PRABOWO- GIBRAN**

**Yosef Usman\*<sup>1</sup>, Fransiskus Ajai<sup>2</sup>, Anjelinus Losi<sup>3</sup>, Odiliana Mirabela<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

<sup>3</sup> Universitas Nusa Nipa, Maumere

<sup>4</sup> IFTK Ledalero, Maumere

E-mail korespondensi\*: yosefusmanpasionis@gmail.com

**Abstract:** The primary focus of this study is to assess the balance between economic growth and substantive democracy. The findings indicate that policies focused on industrial downstreaming, food security, and public welfare have the potential to enhance economic capabilities. This study aims to examine the idealism of Indonesia Emas 2045 within the dynamics of Indonesian democracy during the Prabowo-Gibran era using Amartya Sen's perspective, particularly the concept of "development as freedom." The approach employed is a literature review with descriptive-critical analysis, utilizing a hermeneutic-phenomenological approach to public policy and development discourse. The author finds that the achievement of the Indonesia Emas 2045 vision is highly dependent on the ability to maintain a balance between economic growth and the strengthening of substantive democracy. Policies such as industrial downstreaming and food security do indeed have the potential to enhance economic capacity; however, they must be accompanied by an expansion of societal freedoms. In the dynamics of the administration led by Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka, there appears to be a tension between accelerating development and the quality of democracy. On the other hand, issues of social inequality, regional disparities, and environmental pressures underscore that the direction of development must prioritize the principles of justice, inclusivity, and sustainability. However, the risk of democratic erosion remains if civil liberties and public participation are neglected. Other challenges such as social inequality, centralization of power, and environmental pressures also affect the sustainability of development. Therefore, achieving Indonesia Emas 2045 requires a balanced integration of economic development and a democracy that is inclusive, just, and sustainable.

**Keywords:** Indonesia Emas 2045, Democracy, Development, Prabowo-Gibran, Amartya Sen

**Abstrak:** Fokus utama penelitian adalah menilai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat berpotensi meningkatkan kapabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan menelaah idealisme Indonesia Emas 2045 dalam dinamika demokrasi Indonesia era Prabowo-Gibran dengan menggunakan perspektif Amartya Sen, khususnya konsep *development as freedom*. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-kritis dengan pendekatan hermeneutika-fenomenologi terhadap kebijakan publik dan wacana pembangunan. Penulis menemukan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penguatan demokrasi substantif. Kebijakan seperti

hilirisasi industri dan ketahanan pangan memang berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi, namun perlu diiringi dengan perluasan kebebasan masyarakat. Dalam dinamika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tampak adanya tarik-menarik antara percepatan pembangunan dan kualitas demokrasi. Di sisi lain, persoalan ketimpangan sosial, kesenjangan antar-wilayah, serta tekanan lingkungan menegaskan bahwa arah pembangunan harus menekankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Namun demikian, risiko pelemahan demokrasi tetap ada apabila kebebasan sipil dan partisipasi publik diabaikan. Tantangan lain seperti kesenjangan sosial, sentralisasi kekuasaan, dan tekanan lingkungan juga memengaruhi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian Indonesia Emas 2045 menuntut integrasi yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Indonesia Emas 2045, Demokrasi, Pembangunan, Prabowo-Gibran, Amartya Sen

## PENDAHULUAN

Membaca visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita kolektif bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Idealisme ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Visi ini tidak hanya menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegaskan pentingnya pembangunan manusia yang berkeadilan dan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Soleh, N., Fajriah, F., & Rahman, F., 2024). Sebagai negara yang tengah menapaki perjalanan panjang reformasi demokrasi sejak tahun 1998, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan inklusif. Hal ini menjadi penting karena demokrasi substantive yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan merupakan syarat fundamental untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Melalui dokumen perencanaan nasional, seperti RPJPN 2025-2045, Indonesia telah menetapkan lima pilar utama sebagai fondasi pembangunan nasional. Pilar tersebut meliputi transformasi ekonomi yang berorientasi global, pembangunan manusia yang berkualitas, pemerataan wilayah untuk mengurangi ketimpangan, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas (Bappenas, 2023, *RPJPN 2025-2045*). Kelima pilar ini diharapkan mampu membawa Indonesia ke posisi strategis sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan setidaknya berada di posisi empat terbesar dunia dalam konteks ekonomi dan pengaruh politik global. Namun, pencapaian cita-cita ini tidaklah mudah, mengingat dinamika politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan. Upaya pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diwujudkan melalui instrumen laporan seperti tinjauan lokal Sukarela (*Voluntary Local Review*), yang berfungsi untuk mengukur progres pencapaian TPB sekaligus menjadi dasar penyesuaian kebijakan yang responsif. Namun demikian, hambatan struktural masih terlihat, terutama pada belum optimalnya reformasi sistem politik dan kepartaian dalam mendukung agenda politik hijau. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pendidikan politik ekologis, reformasi kebijakan publik, serta peningkatan sinergi lintas sektor guna memperdalam implementasi visi keberlanjutan di masa depan (Sari, 2025).

Kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa aura ambisius dan gagasan besar dalam memperkuat posisi Indonesia melalui berbagai inovasi kebijakan, termasuk percepatan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial strategis (Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W., 2024). Kendati demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana Indonesia mampu menjaga

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasi yang substantif. Jika proses demokrasi hanya bersifat prosedural dan tidak mampu memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif, maka risiko terjadinya pelemahan demokrasi dan munculnya 'otoritarianisme makmur' dapat meningkat, bahkan mengancam kesuksesan pembangunan nasional. Selain aspek ekonomi dan demokrasi, isu penting yang turut bermakna dalam konteks ini adalah degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial yang semakin melebar (Tomomi, 2024). Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, perlu mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan agar tidak mengalami kerusakan lingkungan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen, pembangunan tidak boleh hanya sekadar peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus mampu memperluas kebebasan dan peluang rakyat secara substantif. Pemikiran ini menegaskan bahwa pembangunan sejati harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat secara menyeluruh, termasuk kebebasan politik dan ekonomi, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia (Sen, A, 1999).

Dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi bonus demografi, strategisnya meningkatkan peluang kerja dan pendidikan menjadi kunci utama agar generasi muda dapat berperan aktif sebagai penggerak pembangunan dan pelopor demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, artikel ini akan mengupas secara mendalam bagaimana kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, dilihat melalui kacamata pemikiran Amartya Sen, dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, artikel ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang peluang dan tantangan yang dihadapi, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penguatan demokrasi substantif agar Indonesia mampu mencapai kemajuan yang berkelanjutan, adil, dan bermartabat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode filsafat politik dengan pendekatan hermeneutika-fenomenologi yang dipadukan dengan analisis kritis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada data empiris yang dapat diukur secara statistik melainkan juga pada dimensi pemikiran, konsep, serta argumentasi filosofis dalam filsafat politik, khususnya pemikiran Amartya Sen mengenai konsep *development as freedom* yang menekankan mengenai pembangunan yang sejati harus memperluas kebebasan substantif manusia, termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini berusaha menelaah bagaimana gagasan Amartya Sen mengenai konsep *development as freedom* yang menekankan mengenai pembangunan yang sejati harus memperluas kebebasan substantif manusia, termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana dijelaskan oleh dengan pendekatan hermeneutika-fenomenologi (Usman, Y., Riyanto, F. X. A., Pandor, 2025). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya Amartya Sen. Adapun data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan filsafat politik maupun sosiologi politik yang membahas pemikiran Amartya Sen serta fenomena politik kontemporer.

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penulis mengidentifikasi serta menghimpun karya-karya asli Amartya Sen yang relevan. Kedua, penulis melakukan analisis kritis terhadap kebijakan makan bergizi gratis. Ketiga, penulis melakukan hermeneutika untuk melihat relevansi pemikiran Amartya Sen dalam memahami persoalan visi dan misi politik kontemporer di Indonesia pada konteks saat ini (*hic et nunc*) (Usman, Y., Guido Reke, B., Emil, Y., Pandor, 2024 ). Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis gagasan filosofis yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih dalam dan menggugah para visi dan misi (dalam trias politika untuk membaca ulang) dan juga reflektif dalam memahami dinamika pembangunan yang sejati harus memperluas kebebasan substantif manusia, termasuk aspek

politik, sosial, dan ekonomi serta berbagai tantangan dalam membangun sistem politik demokratis yang kuat, utuh, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Panorama Amartya Sen dan Pemikirannya**

Amartya Kumar Sen merupakan seorang ekonom dan filsuf asal India yang lahir pada tahun 1933, terkenal karena gagasannya tentang pembangunan yang berpusat pada kebebasan. Dalam karya terkenalnya, *Development as Freedom* (1999), Sen menegaskan bahwa indikator sejati dari keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi seperti PDB, melainkan juga perluasan kebebasan dan kesempatan rakyat secara menyeluruh (Runesi, W. F, 2023). Secara konsep, Sen berargumen bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses yang memperluas kemampuan dan kebebasan individu dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, serta perlindungan dari diskriminasi dan penindasan. Ia menekankan bahwa kebebasan ini saling terkait dan menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat, melampaui angka-angka statistik ekonomi semata. Sen juga meyakini bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya sebagai prosedur formal pemilihan umum, melainkan harus berfungsi sebagai mekanisme deliberatif yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya berjalan secara statistik melainkan juga menghasilkan manfaat nyata dan keadilan sosial yang dirasakan semua warga.

Selain itu, dalam kerangka teorinya, Sen memperkenalkan konsep *capability approach*, yaitu menilai kemajuan pembangunan berdasarkan kemampuan dan peluang individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna. Ia menegaskan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan sosial dapat dicegah apabila kebijakan pembangunan fokus pada memperluas *capability* masyarakat, bukan hanya sekadar meningkatkan pendapatan (Gumelar, S., & Qomar, S, 2025). Secara biografis, Sen berasal dari keluarga akademik yang mendukungnya menjadi seorang intelektual dan tokoh dunia. Ia pernah menduduki posisi di berbagai institusi akademik ternama dan menerima sejumlah penghargaan internasional, termasuk Penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Dengan demikian, filsafat Sen menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kebebasan manusia secara komprehensif meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia sehingga pembangunan menjadi penuh arti dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### **2. Meneropong Idealisme Indonesia Emas 2045 dan Kebebasan Substantif**

Dalam konteks ini, pembangunan yang sesungguhnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDB, tetapi juga harus mencakup perluasan kebebasan individu, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam proses politik (Syawaluddin, S, 2015). Sen berpendapat bahwa demokrasi yang sehat adalah sebuah mekanisme deliberatif yang memungkinkan rakyat ikut serta menentukan masa depan bangsa, bukan hanya sekadar proses prosedural pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Studi ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan pemerintah Prabowo–Gibran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik yang ambisius seperti hilirisasi industri dan ketahanan pangan tantangan utama adalah memastikan pembangunan tersebut tidak mengorbankan aspek demokrasi substantif.

Pengukuran kesiapan *e-government* didasarkan pada tingkat kemajuan infrastruktur teknologi sebagai indikator kemampuan negara dalam memanfaatkan ICT untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kultural (Roy & Upadhyay, 2017). Dalam kerangka EGDI, terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yakni OSI, TII, dan HCI (Chen & Li, 2024). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada tingkat moderat, yang mencerminkan adanya kemajuan, tetapi belum cukup kompetitif di tingkat regional. Hal ini terlihat dari ketertinggalan Indonesia dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Vietnam (Hadi et al.,

2024). Terdapat risiko munculnya “otoritarianisme makmur” jika kebebasan sipil dan hak asasi manusia tidak diperkuat secara seimbang. Hal ini karena adanya kecenderungan untuk menumpulkan ruang sipil dan memperkuat sentralisasi kekuasaan yang dapat menghambat partisipasi rakyat secara aktif dan luas (Indarti, S. H. 2017).

Keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperkuat kedua aspek tersebut secara bersamaan, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif dan demokrasi substantif yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dan menuntut hak-haknya. Oleh karena itu, pencapaian visi ini bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kualitas demokrasi dan kebebasan warga tetap terjaga agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata dan bermartabat (Aisyapuri, R. P., Wulandari, R. A. P., Ikmawati, I., & Untu, Z. 2025). Peran kolektif seluruh unsur kebangsaan memperkuat legitimasi negara dalam mengemban fungsi kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada kesadaran masyarakat bahwa negara merupakan sarana bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kebangsaan berfungsi sebagai basis moral yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan redistributif. Ikatan identitas nasional yang kuat mendorong meningkatnya dukungan publik terhadap distribusi sumber daya, jaminan sosial, serta perlindungan masyarakat (Faudillah et al., 2023).

Konsep negara kesejahteraan sendiri merujuk pada model negara yang menjadikan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama. Negara tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik dan pemerataan kesempatan hidup. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan masyarakat yang hanya dapat tercapai apabila menjadi pengetahuan bersama. Pengetahuan ini terbentuk melalui komunikasi, baik secara langsung oleh pemerintah maupun secara tidak langsung melalui media sebagai perantara (Cevi Mochamad Taufik<sup>1</sup>, Dono Darsono, 2025). Dari hasil dari penelitian ini, sebenarnya mau menggarisbawahi bahwa keberhasilan Indonesia mencapai cita-cita 2045 sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasi, seperti yang didukung oleh teori Amartya Sen tentang *development as freedom*.

Pembangunan yang berorientasi pada kebebasan substantif akan memastikan terciptanya masyarakat yang bebas, sejahtera, dan bermartabat, bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia. Pengaruh kepemimpinan nasionalis terhadap kepuasan kerja pegawai terbukti signifikan dan substansial. Melalui pengarusutamaan nilai-nilai nasional dalam budaya organisasi, pemimpin mampu menghadirkan dimensi makna kerja yang lebih dalam, memperkuat ikatan emosional pegawai, serta meningkatkan loyalitas terhadap institusi. Lebih lanjut, kepemimpinan nasionalis juga berfungsi sebagai variabel mediasi dalam relasi antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja, walaupun tingkat mediasi tersebut berada pada level moderat secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme dalam kepemimpinan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas organisasi, khususnya dalam menghadapi tekanan modernisasi dan tingginya mobilitas tenaga kerja (Galuh Boga Kuswara, 2025).

### **3. Membaca Demokrasi Indonesia Prosedural Versus Substantif**

Meskipun sistem demokrasi elektoral sudah mengalami kemajuan dengan adanya pemilihan langsung, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang semakin berkembang, tantangan utama tetap muncul dari berbagai aspek (Nadeak, F. (2024). Pengaruh politik uang, dominasi elit tertentu, serta terbatasnya ruang sipil menjadi faktor yang melemahkan kualitas demokrasi substantif di Indonesia (Irawan, B. B. (2016). Sen menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya sekadar prosedur formal yang diikuti setiap lima tahun, melainkan harus menciptakan ruang diskusi dan deliberasi publik yang terbuka dan inklusif. Demokrasi yang ideal adalah yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses terhadap berbagai hak sipil dan politik yang

mendukung kebebasan mereka. Jika aspek-aspek ini diabaikan, maka demokrasi akan tetap bersifat prosedural dan kehilangan makna yang sesungguhnya (Runesi, W. F.2022).

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Sen menawarkan kerangka analisis yang kritis terhadap pembangunan demokrasi, menekankan pentingnya memperkuat aspek substantifnya. Sebab, keberlangsungan demokrasi yang sehat akan memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan, termasuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 . Keterlibatan Informan 2 dalam politik didasari oleh keinginan untuk mengedukasi generasi muda agar meninggalkan praktik politik uang dan lebih mengedepankan pertukaran ide. Tujuan akhirnya adalah menciptakan suasana politik yang konstruktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 (Anak et al., 2024). Jika ruang demokrasi terhambat oleh politik uang, oligarki, atau pembatasan terhadap kebebasan sipil, maka keberhasilan pembangunan ekonomi yang besar pun berisiko tidak merata dan tidak inklusif (Miletzki, J., & Broten, N. 2017).

Selain itu, gejatan terhadap praktik oligarki dan politik uang perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat praktik ini dapat memperlemah keterwakilan rakyat dan memperkuat kekuasaan elit yang tidak transparan. Kualitas demokrasi yang tinggi harus didukung oleh sistem tata kelola yang bersih, kelembagaan yang kuat, dan kebebasan berpendapat yang dijamin secara konstitusional (Mubin, A. 2019). Partisipasi aktif masyarakat melalui media, organisasi masyarakat sipil, dan ruang dialog menjadi unsur penting guna memperkuat demokrasi substantif dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara (Suri, D. 2019).

Kesimpulannya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai cita-cita besar di masa depan sangat tergantung pada bagaimana reformasi demokrasi berlangsung secara menyeluruh dan efektif, sekaligus memperhatikan aspek-aspek kebebasan dan keadilan. Pemikiran Amartya Sen menegaskan bahwa demokrasi harus menjadi suatu kerangka kerja yang mendorong diskursus publik yang produktif dan inklusif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi hak-hak dan kebebasan warga sebagai unsur utama pembangunan manusia dan bangsa. Dengan kata lain, pembangunan Indonesia menuju 2045 akan menjadi nyata jika demokrasi yang dijalankan mampu memberi ruang penuh bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dan memastikan hak-hak mereka terlindungi secara substantive (Zulkadri, Z., Citra, A. A., Rahmawati, R., & Putri, O. A. 2025).

#### **4. Menungkap Paradoks Idealisme dan Program-Program Ambisius Prabowo-Gibran**

Kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini tengah berlangsung dan dinilai berusaha merealisasikan janji-janji kampanye yang mereka usung dalam Pemilu 2024. Upaya ini kemudian memunculkan suatu idealisme pemerintahan yang oleh sejumlah analis disebut sebagai "proyek ambisius (Analisis Badai Inflasi Hipotetis, 2025). Namun, implementasi dari idealisme tersebut tampak melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai terburu-buru, populis, dan kurang berbasis pada kalkulasi yang matang, sehingga efektivitas serta dampak nyatanya terhadap masyarakat dipertanyakan.

Beberapa kebijakan yang telah dicanangkan bahkan dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang masih menunjukkan kinerja kurang optimal, seperti tingginya angka utang negara, minimnya peningkatan realisasi investasi, tingginya tingkat pengangguran, serta meningkatnya ketimpangan dan gejolak sosial. Model kepemimpinan transformasional berbasis Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi diterapkan melalui prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan pertahanan dilakukan secara bijaksana tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya (Maskare et al., 2025). Kondisi ini mencapai titik eskalasi ketika muncul gelombang demonstrasi, khususnya sebagai respons terhadap kenaikan tunjangan DPR RI, yang dipelopori oleh mahasiswa dan menyebar dari Jakarta ke sejumlah kota besar lainnya seperti Makassar, Pontianak, Surabaya, dan Medan (Aristama, F. 2023).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan reflektif yang patut dipertimbangkan bersama: sejauh mana idealisme pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercermin dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Danantara, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, pembangunan Foot Steat di Papua, serta pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bekas dapat dibenarkan dalam konteks tingginya beban utang negara dan keterbatasan fiskal yang ada? Perkembangan terkini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan ekonomi semata, tetapi juga merambah pada aspek politik dan dinamika sistem demokrasi di Indonesia (Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. 2024). Maka, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan dan idealisme pemerintahan Prabowo-Gibran justru memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional? Lebih lanjut, patut dipertanyakan pula apakah kebijakan-kebijakan tersebut masih sejalan dengan tujuan dan amanat konstitusi negara, yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia?

### **5. Membaca Kebijakan Prabowo-Gibran dalam Lensa Amartya Sen**

Pada poin ini Penulis akan membahas perspektif Amartya Sen terkait kebijakan Prabowo-Gibran dalam konteks pembangunan nasional. Program-program seperti hilirisasi industri dan ketahanan pangan diidentifikasi sebagai upaya untuk memperluas kebebasan ekonomi rakyat, misalnya dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan secara umum. Dalam konteks politik modern, keterkaitan antara visi dan kebijakan sangat menentukan arah pembangunan.

Visi berfungsi sebagai gambaran tujuan jangka panjang yang diusung oleh aktor-aktor politik, yang kemudian menjadi dasar dalam merancang kebijakan. Kebijakan sendiri adalah bentuk konkret dari keputusan dan tindakan yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Para pengambil kebijakan menjadikan visi sebagai acuan dalam menyusun prioritas dan strategi. Ketika kebijakan sejalan dengan visi, legitimasi publik akan semakin kuat karena dipandang sesuai dengan harapan kolektif masyarakat (Astuti, 2025). Namun, dalam kerangka pemikiran Amartya Sen, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari aspek pertumbuhan materiil saja. Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati harus mencakup perluasan kebebasan sipil dan politik, serta memperhatikan aspek sosial dan hak asasi manusia (Molan, B. 2011).

Jika menilik ke pembangunan ekonomi dilakukan tanpa memperhatikan kebebasan sipil dan ruang partisipasi warga, maka berisiko munculnya bentuk otoritarianisme yang disebut Sen sebagai "otoritarianisme makmur." Dalam kondisi ini, ekonomi bisa berkembang, tetapi rakyat tidak menikmati kebebasan dan hak-hak politiknya secara memadai. Dalam kondisi politik yang labil dan penuh ketidakpastian sosial, populisme hadir sebagai respons dengan mengangkat isu-isu emosional di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Aktor populis beroperasi secara dinamis dengan mengklaim diri sebagai representasi rakyat, sekaligus membangun narasi perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap korup, oligarkis, dan represif. Posisi ini menempatkan mereka sebagai antagonis bagi elit, globalisasi neoliberal, serta praktik ketidakadilan struktural. Meski demikian, dalam praktiknya populisme kerap bertransformasi menjadi instrumen bagi kekuatan baru untuk berintegrasi ke dalam lingkaran oligarki. Dengan demikian, populisme tidak hanya menjadi strategi mobilisasi massa, tetapi juga bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan oligarkis. Fenomena ini diperparah oleh kecenderungan pragmatisme dan iliberalisme, yang secara simultan melemahkan demokrasi. Akibatnya, kekuasaan semakin terkonsentrasi pada oligarki, konglomerat, dan elit politik, sementara kebebasan sipil serta hak berekspresi mengalami kemunduran (Didin Sabarudin<sup>1</sup>, Rizqi Ghassani, 2025).

Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa kebebasan sipil harus diringkas dalam kerangka teori Sen. Pembangunan yang berorientasi hanya pada aspek ekonomi, tanpa diimbangi kebebasan politik dan sosial, berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan, serta mempertahankan kekuasaan

elit tertentu. Sebaliknya, pembangunan yang ideal adalah yang mampu memperkaya kehidupan rakyat secara material sekaligus membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan atau keterbatasan hak (Siregar, R. 2017, May).

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar melalui program seperti hilirisasi dan ketahanan pangan benar-benar memperkuat kebebasan rakyat (Herry-Priyono, B. 2015). Jika tidak, maka pembangunan tersebut dapat berefek negatif, yakni munculnya “otoritarianisme makmur,” yang ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang semakin menguat dan kurangnya ruang demokratis untuk partisipasi warga. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan kebebasan sipil, sebagaimana yang ditekankan oleh pemikiran Amartya Sen (Sen, A. (2014).

Pada akhirnya, keberhasilan pemimpin Prabowo-Gibran dalam mewujudkan visi pembangunan akan sangat bergantung pada kemampuan mereka menjaga keseimbangan ini. Mereka harus mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat demokrasi dan kebebasan warga, sehingga pembangunan benar-benar bermakna manusiawi dan berkelanjutan di masa depan (Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. 2024).

## **6. Menyibak Peluang dan Tantangan Menuju 2045**

Dalam analisis terhadap peluang dan tantangan menuju Indonesia Emas 2045, dapat dipastikan bahwa yang menjadi peluang utama ialah meliputi bonus demografi, stabilitas politik, industrialisasi, dan posisi geopolitik strategis (Rahman, A. 2021). Bonus demografi, terutama potensi dari keberadaan penduduk muda yang besar, dapat menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Stabilitas politik mendukung keberlanjutan pembangunan dan menarik investasi asing, sementara industrialisasi dapat memperkuat basis ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Posisi geopolitik strategis Indonesia juga memberi peluang untuk memperkuat peran dalam hubungan internasional dan memperluas pengaruhnya di kawasan dan dunia.

Dedikasi yang tinggi dalam mewujudkan visi tersebut mampu menginspirasi seluruh civitas akademika. Pengalaman yang diperoleh dari berbagai negara turut memperkaya wawasan globalnya dalam bidang pengembangan pendidikan tinggi dan inovasi. Dengan bekal tersebut, ia dapat menyusun strategi yang adaptif terhadap perkembangan global. Di sisi lain, kemampuannya dalam melakukan perbandingan sistem pendidikan tinggi Indonesia dengan negara lain memungkinkan ditemukannya kekurangan yang perlu dibenahi (Melinda et al., 2024).

Namun, tantangan yang perlu diatasi sangat besar, di antaranya kesenjangan sosial yang melebar, sentralisasi kekuasaan yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi rakyat, serta degradasi demokrasi yang mengancam kualitas proses demokrasi itu sendiri. Selain itu, kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimasa depan. Generasi muda diingatkan untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi agar tetap inklusif dan demokratis, serta mampu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Aspinall, E., & Warburton, E. 2017). Keseluruhan keberhasilan menuju Indonesia ‘emas’ 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memanfaatkan peluang secara optimal sekaligus mengatasi tantangan utama tersebut. Pemanfaatan peluang dan pengelolaan tantangan ini harus dilakukan secara berimbang dengan menempatkan keadilan sosial, demokrasi yang sehat, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pembangunan akan benar-benar menjadi jalan untuk mencapai cita-cita bangsa yang maju, sejahtera, dan bermartabat, sesuai visi Indonesia Emas 2045.

**KESIMPULAN**

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai cita-cita 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penguatan demokrasi substantif. Pembangunan yang berorientasi pada kebebasan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan akan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan bermartabat. Jika keseimbangan ini tidak dijaga, maka risiko pelemahan demokrasi, ketimpangan sosial, serta potensi stagnasi pembangunan akan terus mengancam visi Indonesia Emas.

Oleh karena itu, strategi pembangunan harus mampu memadukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan penguatan tata kelola demokrasi yang sehat dan partisipatif, agar cita-cita bangsa menjadi nyata dan berkelanjutan di masa depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang substansial. Upaya ini perlu diwujudkan melalui investasi berkelanjutan pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan literasi digital agar masyarakat mampu menghadapi tantangan global. SDM yang unggul tidak hanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga memperdalam kesadaran demokratis warga negara.

Di samping itu, reformasi dalam bidang kelembagaan dan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tanpa kepercayaan tersebut, kebijakan pembangunan akan sulit memperoleh legitimasi publik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi untuk menjaga kesinambungan stabilitas politik. Pada akhirnya, peran masyarakat sipil dan teknologi digital menjadi semakin penting dalam memperluas partisipasi demokratis. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan akan memastikan bahwa pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif. Sinergi antara negara, pasar, dan masyarakat pun menjadi landasan utama dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang yang memberikan sumbangan pemikiran terkait diskusi seru filsafat politik ini dan persoalan membaca peluang dan tantangan 2045 yang akan datang. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dewan Jurnal Kebangsaan Republik Indonesia dan semua saja yang berkenan merevisi, mengoreksi atau kritikan yang konstruktif artikel ilmiah ini. Penulis yakin dan percaya bahwa dengan masukan dan dukungan dari dosen, teman seangkatan serta dewan Jurnal Kebangsaan Republik Indonesia semuanya, penelitian ini memberikan kontribusi kecil kepada masyarakat Indonesia dan para peneliti lain dalam konteks kekinian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anak, R., Studi, P., Rekrutmen, P., & Solidaritas, P. (2024). *REPRESENTATION OF YOUTH IN POLITICS ( STUDY OF RECRUITMENT PATTERNS OF THE INDONESIAN SOLIDARITY PARTY IN MEDAN CITY )*. 8(2), 12735–12742. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4440>
- Astuti, K. D. (2025). *PERAN VISI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN*. 1(1), 9–15.
- Aisyapuri, R. P., Wulandari, R. A. P., Ikmawati, I., & Untu, Z. (2025). *PERAN PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA EMAS 2045*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 5(2), 609-614.
- Aristama, F. (2023). *Emerging Middle Power dan Tantangan Perwujudan Visi Indonesia 2045 di Asia Pasifik: Systematic Review [Emerging Middle Power and Challenges on*

- Realizing Vision of Indonesia 2045 in Asia Pacific: Systematic Review]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 298-318.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2017, November). Indonesia: The dangers of democratic regression. In *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017)* (pp. 1-4). Atlantis Press.
- Bappenas. (2023). *RPJPN 2025–2045: Visi Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Didin Sabarudin, & Rizqi Ghassani. (2025). *The sceptre (kekuasaan) dan the spectre (hantu): Dua wajah populisme dalam demokrasi (liberal)*. *Jurnal Kebangsaan RI*, 2(2).
- Faudillah, A. N., Husna, F., & Makhfiroh, N. R. (2023). IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI BANGSA. *AMI, Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 1(1), 1–12. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 260-269.
- Hadi, I., Ayu, I., & Sri, P. (2024). *Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis : Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )*. 06(02), 639–658.
- Herry-Priyono, B. (2015). Amartya Sen Membongkar Rasionalitas. *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, 14(1), 38-79.
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia dalam pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 35-50.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Kuswara, G. B. (2025). *Kepemimpinan nasionalis perusahaan sebagai mediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai perusahaan di Kota Bandung*. *Jurnal Kebangsaan RI*, 2(2).
- Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 114-129.
- Maskare, A., Fahribi, A., Supriono, D., Erlangga, A., Susilo, T., & Daya, M. S. (2025). *Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan*. 9(3), 109–126.
- Melinda, D., Bangun, B., Hutajulu, Z., Kurniawan, B., & Madura, U. T. (2024). *Modalitas dalam pidato joko widodo bicara soal sdm berkualitas menuju negara maju di forum rektor indonesia*. 2(7).
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo-Gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10.
- Mietzner, M. (2019). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS.
- Miletzki, J., & Broten, N. (2017). *An analysis of Amartya Sen's Development as freedom*. Macat Library.
- Molan, B. (2011). Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik. *Molansio*. Wordpress. Com. <https://molansio.wordpress.com/2012/11/30/>. Diakses 20 Maret 2026, pkl 23:30 wib.
- Mubin, A. (2019). Refleksi Pendidikan Filsafat Idealisme. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 15(2).
- Nadeak, F. (2024). Analysis of the Prabowo-Gibran C analysis of the Prabowo-Gibran campaign model in the 2024 presidential and vice presidential elections. *Sociae Polites*, 25(1), 34-49.
- Sari, S. F. (2025). *Membangun visi politik yang berkelanjutan untuk masa depan bangsa*.

1(1), 1–8.

- Taufik, C. M., & Darsono, D. (2025). *Komunikasi kebangsaan: Memahami relasi kebangsaan dengan bentuk negara kesejahteraan. Jurnal Kebangsaan RI*, 3(1).
- Rahman, A. (2021). Quo Vadis Visi Negara Maju 2045. *Book Chapter*, 1.
- Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan: (Analisis Wacana Kritis Visi Dan Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Moderenisasi). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 97-120.
- Runesi, W. F. (2022). Membongkar Rasionalitas: Pemikiran Amartya Sen tentang Kekuasaan Ekonomi. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 38(3), 329-351.
- Runesi, W. F. (2023). Kritik Amartya Sen terhadap Naluri, Nalar, dan Nilai dalam Diri Manusia Ekonomi. *MELINTAS an International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 39(3), 282-306.
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change*, 525.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Siregar, R. (2017, May). Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. In *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan* (Vol. 2, No. 2, pp. 378-381).
- Soleh, N., Fajriah, F., & Rahman, F. (2024). Kontribusi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. *Journal of Smart Education and Learning*, 1(1), 22-28.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam perwujudan pembangunan nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177-187.
- Syawaluddin, S. (2015). Refleksi atas pemikiran Amartya Kumar Sen tentang ketimpangan dan kemiskinan. *Al-Buhuts*, 11(1), 1-10.
- Tomomi, I. (2024). *Democratic Retreat and the Consolidation of Oligarchy in Indonesia under Jokowi*. 2014–2024.
- Usman, Y., Guido Reke, B., Emil, Y., Pandor, P. (2024). *Charles Wright Mills and The Power Elite Theory: Analyzing Alfamart's Position in the Local Economic Elite Network in Indonesia*. 7672 *JOURNAL ISRG PUBLISHERS* (Iii), 138–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11312985>
- Usman, Y., Riyanto, F. X. A., Pandor, P. (2025). *MENGGELEDAH EKSISTENSI KAUM MARHAEN DALAM MENGISIH DAN MEMAKNAI KEBIJAKSANAAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA ( Tinjauan Berfilsafat Politik - F . X . Armada Riyanto )*. *Jurnal Filsafat Sanjiwani* (September), 154–168. DOI : <https://doi.org/10.25078/sjf.v16i2.3215>
- Zulkadrin, Z., Citra, A. A., Rahmawati, R., & Putri, O. A. (2025). Analisis Badai Inflasi Hipotetis: Dampak dan Respons Kebijakan pada Awal Pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia Tahun 2025. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 187-202.